

**RENCANA KERJA AWAL
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2026**



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Awal Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Renja Dinas Perikanan ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Timur 2025-2029, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan .

Semoga Rencana Kerja Awal ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



H. Yuliansyah, S.T., M.T

Pembina Utama Muda/IVc

NIP 196907042000031007

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.3.1. Maksud Penyusunan	I-7
1.3.2. Tujuan Penyusunan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Perikanan	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-16
2.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025	II-19
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-34
2.5. Review Terhadap Rancangan Akhir Renja	II-41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-1
3.3. Program dan Kegiatan SKPD	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Catatan Penting	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3. Saran dan Tindak Lanjut	V-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

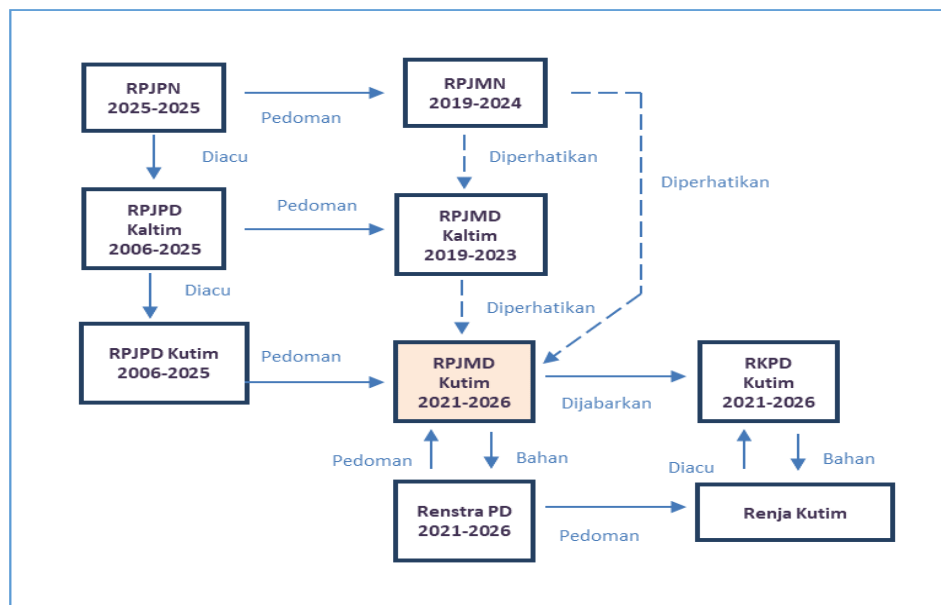
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*) menjadi 'Instrument Penting' pembangunan daerah karena memiliki

fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renja SKPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA).

Rancangan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Dinas Perikanan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat (Musrenbang) .

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. Berdasarkan diagram tersebut RKPD dan RENSTRA SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Gambar 1.1
Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004 (diolah)

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
13. Aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
15. PerIntruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010

Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
33. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur untuk 1 (satu) tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2026.

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur selama 1 (satu) tahun yang selaras dengan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dan RKPD.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, untuk jangka pendek.
3. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN LALU

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PRANGKAT DAERAH

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan, dan juga Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja dan pendanaan pada program kegiatan Dinas Perikanan Kutai Timur.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang Catatan Penting, Kaidah Pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain ; penguatan peran para stake holders dalam pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kerja tahunan, serta Saran dan Tindak Lanjut.

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perikanan sudah disahkan. Yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan tabel program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil renja dan pencapaiannya seperti pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s/d Tahun 2026 Kabupaten Kutai Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2026		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+ 7+9)	11=(10/4* 100)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
3.25.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dokumen	3	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100	7	Dokumen	17	56,67

3.25.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	60,0
3.25.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	5,0
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
3.25.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 0	Orang/b ulan	80	Orang/b ulan	12 4	Orang/b ulan	12 1	Orang/b ulan	97,58	12 4	Orang/b ulan	325	51,59
3.25.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	60	Dokume n	1	Dokume n	6	Dokume n	6	Dokume n	100	12	Dokume n	19	31,67
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
3.25.01.2.03 .0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	5	Laporan	0	0	1	Laporan	1	Laporan	100	0	0	1	20

	Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD													
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100	0	0	4	26,66666667
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60,00
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	600	Orang	24	Orang	108	Orang	6	Orang	5,56	0	0	30	5,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	60,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT BBI Kaliorang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	12,00

3.25.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT BBU Teluk Lombok)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	1	Paket	0	0	0	0	0	0	0	1	5,00
3.25.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT BBIAL Teluk Kaba)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	1	Paket	0	0	0	0	0	0	0	1	4,00
3.25.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	0	0	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	2	40,00
3.25.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	0	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	2	40,00
3.25.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	5
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia													
3.25.01.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	30	Unit	3	Unit	2	Unit	5	Unit	250	1	Unit	9	30,00

3.25.01.2.07 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	0	0	2	Unit	1	Unit	50	0	0	1	20,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya jasa Urusan Pemerintahan Daerah													
3.25.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Laporan	0	0	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	2	3,33
3.25.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT BBI Kaliorang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	5

3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Barang yang terpelihara													
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	120	Unit	26	Unit	18	Unit	18	Unit	100	22	Unit	66	55
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	Unit	4	Unit	1	Unit	2	Unit	200	0	0	6	42,86
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)													
		Jumlah Kelompok Penangkap Ikan													

3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat													
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	60	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	5	8,33
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan yang diberdayakan													
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	1270	orang	50	orang	0	0	0	0	0	220	orang	270	21
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	2500	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (UPT. TPI Sangkulirang)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	Layanan	0	0	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	2	40,00
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (UPT. TPI Kenyamukan)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	Layanan	0	0	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	2	40,00
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	500	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil														
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil (UPT. BBI Kaliorang)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan	8	Kelompok	1	Kelompok	2	Kelompok	2	Kelompok	100	2	Kelompok	5	63

		Kapasitas													
3.25.04.2.02 .0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPT. BBU Teluk Lombok)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	Kelompok	1	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	1	10
3.25.04.2.02 .0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPT. BBIAL Teluk Kaba)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	Kelompok	1	Kelompok	2	Kelompok	0	Kelompok	0	1	Kelompok	2	20
3.25.04.2.02 .0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	11 5	kelompok	5	Kelompok	4	Kelompok	15	Kelompok	0	0	0	20	17
3.25.04.2.02 .0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	22	Kelompok	440	10	Kelompok	37	74

3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan														
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	Dokumen	1	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	9	Dokumen	22	37
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	85	Unit	218	Unit	13	Unit	13	Unit	100	10	Unit	241	284
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	20
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	0	12	Dokumen	13	21,6666667

3.25.04.2.04 .0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 0	Unit	0	0	0	0	0	0	0	3	Unit	3	2,142857 143
3.25.04.2.04 .0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	50	Dokumen	5	Orang	0	0	0	0	0	3	Dokumen	8	16
3.25.04.2.04 .0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	80	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam														

	Kabupaten/Kota														
3.25.05.2.01 .0004	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	42	Pelaku Usaha	0	0	5	Pelaku Usaha	5	Pelaku Usaha	100	11	Pelaku Usaha	16	38
3.25.05.2.01 .0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	42	Pelaku Usaha	0	0	5	Pelaku Usaha	5	Pelaku Usaha	100	5	Pelaku Usaha	10	24
3.25.05.2.01 .0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	42	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0	0	10	Pelaku Usaha	10	24
3.25.05.2.01 .0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibentuk	10 0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil														
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	12	Dokumen	14	280,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														

3.25.06.2.02 .0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan perizinan berusaha pada usaha pengolahan Dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	50	Unit Usaha	0	0	10	Unit Usaha	10	Unit Usaha	100	15	Unit Usaha	25	50,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota														
3.25.06.2.03 .0002	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	10	Pelaku Usaha	100	0	0	20	200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah dibidang Perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perikanan adalah membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan.

2. Fungsi Dinas Perikanan adalah :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang Perikanan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perikanan ;
- c. Pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan dan Perikanan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tertuang pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Produksi Perikanan (Ton)		Produksi Perikanan Tahun	8.085,61	8.085,86	8.086,11	8.086,36	9.982,10	9.976.19	Naik	Turun	Terjadi Penurunan produksi Perikanan Budidaya
2	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Tahun)		Jumlah Rata-rata Konsumsi Ikan Per Kapita	41.86	40,1	40,1	40,25	41,29	39.16	Naik	Turun	Angka Konsumsi ikan menurun
3	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul		Jenis Bibit (Spesies)	5	5	5	5	5	4	Naik	Turun	Jumlah jenis Bibit yang beredar menurun
4	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		Kelompok Pokmaswas (Kelompok)	5	3	4	4	3	4	Naik	Naik	Jumlah pokmawas yang aktif
5	Jumlah Kelompok Penangkap Ikan		Kelompok Nelayan		50	50	50	81	0	Naik	-	Jumlah Kelompok penangkap Ikan

6	Jumlah Kelompok Pembudidaya a Ikan		Kelompok Pembudidaya Ikan		13	13	13	15	44	Naik	Naik	Terjadi peningkatan kesadaran kelompok
---	---	--	---------------------------------	--	----	----	----	----	----	------	------	---

2.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan sejumlah program. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

TABEL 2.3
LAPORAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PERIKANAN
DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPTK	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT (%)	REALISASI					PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT YANG DIAMBIL	KET
						FISIK (%)	TERTIMBANG FISIK (%)	KEU (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISADANA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.750.141.124					21.805.327.634	4.253.499.573			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			424.829.000		82,13		75,01	259.670.312	165.158.688			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	266.130.000	0,42	50,41	0,21	50,41	134.148.230	131.981.770			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	74.704.000	0,12	88,77	0,10	88,77	66.314.082	8.389.918			
	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.995.000	0,13	70,49	0,09	70,49	59.208.000	24.787.000			

				n/Desa										
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.037.841.46 9					15.606.268.53 5	3.431.572.934			
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	18.662.677.46 9	29, 15	100,00	29,15	82,13	15.328.527.64 0	3.334.149.829			
	5	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifi kasi Keuangan SKPD	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	375.164.000	0,5 9	77,12	0,45	74,03	277.740.895	97.423.105			
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42.075.000					29.620.000	12.455.000			
	6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	42.075.000	0,0 7	100,00	0,07	70,40	29.620.000	12.455.000			
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			324.561.100					289.180.000	35.381.100			

	7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	262.901.100	0,41	100,00	0,41	97,47	256.260.000	6.641.100			
	8	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	33.660.000	0,05	71,12	0,04	53,24	17.920.000	15.740.000			
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	28.000.000	0,04	53,57	0,02	53,57	15.000.000	13.000.000			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.789.092.351					2.547.287.739	241.804.612			
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2.041.122.479	3,19	93,33	2,98	92,09	1.879.759.254	161.363.225			
	11	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	313.134.672	0,49	100,00	0,49	93,98	294.284.751	18.849.921			

	1 2	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	56.631.200	0,0 9	100,00	0,09	95,99	54.358.000	2.273.200			
	1 3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	378.204.000	0,5 9	84,67	0,50	84,32	318.885.734	59.318.266			
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.048.801.599					1.521.388.432	527.413.167			
	1 4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	-	0,0 0	-	0,00	0,00	-	-			
	1 5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	1.147.200.000	1,7 9	100,00	1,79	95,14	1.091.481.004	55.718.996			
	1 6	Pengadaan sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Anith a Fithri anie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	901.601.599	1,4 1	50,00	0,70	47,68	429.907.428	471.694.171			
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.110.860.598					959.414.848	151.445.750			

	17	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.110.860.598	1,73	100,00	1,73	86,37	959.414.848	151.445.750			
8		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			972.080.007					592.497.768	379.582.239			
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	23.989.000	0,04	99,83	0,04	72,01	17.275.550	6.713.450			
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	446.865.328	0,70	21,13	0,15	21,13	94.441.800	352.423.528			
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Anitha Fithrianie, S.Kel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	501.225.679	0,78	100,00	0,78	95,92	480.780.418	20.445.261			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					2.794.155.880		79,36		76,46	2.530.938.838	263.217.042			

9	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				474.689.400					275.651.300	199.038.100			
	21	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Wilhelmina M. K, S.Pi., MP	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	363.347.000	0,57	51,00	0,29	51,00	185.306.900	178.040.100			
	22	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Wilhelmina M. K, S.Pi., MP	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	111.342.400	0,17	89,30	0,16	81,14	90.344.400	20.998.000			
10	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.319.466.480					2.255.287.538	64.178.942			
	23	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Wilhelmina M. K, S.Pi., MP	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2.319.466.480	3,62	97,78	3,54	97,23	2.255.287.538	64.178.942			
	24	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Wilhelmina M. K, S.Pi., MP	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-			

11	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-					-	-			
	25	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Wilhelmina M. K, S.Pi., MP	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					32.074.392.233		84,20		54,14	25.986.980.677	6.087.411.556			
12	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-					-	-			
	26	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 /(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi	Achmad Jayadi, S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-			

		Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing											
13		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			966.478.260					670.107.422	296.370.838		
	2 7	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Achm ad Jayadi ,S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	768.037.000	1,2 0	95,48	1,15	76,35	586.379.272	181.657.728		
	2 8	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Achm ad Jayadi ,S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	84.764.160	0,1 3	100,00	0,13	35,52	30.108.000	54.656.160		
	2 9	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Achm ad Jayadi ,S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	113.677.100	0,1 8	89,51	0,16	47,17	53.620.150	60.056.950		
14		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			31.107.913.97 3					25.316.873.25 5	5.791.040.718		

	30	Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Achmad Jayadi, S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	131.501.000	0,21	98,73	0,20	52,83	69.472.400	62.028.600			
	31	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ahmad Dzulkram, S.E	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	30.460.394.297	47,57	90,00	42,82	82,37	25.089.437.707	5.370.956.590			
	32	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Achmad Jayadi, S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	516.018.676	0,81	31,49	0,25	30,61	157.963.148	358.055.528			
	33	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Achmad Jayadi, S.Pi. MM	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-			
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					335.619.140		99,55		97,69	327.946.900	7.672.240			
15		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			335.619.140					327.946.900	7.672.240			

	34	Pengawasan usaha Pembudidayaan ikan sesuai Kewenangan kabupaten/ kota	Mukhlis, S. Pd	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	161.989.000	0,25	99,38	0,25	96,96	157.066.450	4.922.550			
	35	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Mukhlis, S. Pd	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	173.630.140	0,27	99,72	0,27	98,42	170.880.450	2.749.690			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.270.505.104		99,59		96,69	1.231.821.800	38.683.304			
16		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			133.603.714					127.057.000	6.546.714			
	36	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Mukhlis, S. Pd	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	133.603.714	0,21	99,62	0,21	95,10	127.057.000	6.546.714			
17		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			381.455.000					375.570.700	5.884.300			

	37	Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Mukhlis, S. Pd	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	381.455.000	0,60	100,00	0,60	98,46	375.570.700	5.884.300			
18		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			755.446.390					729.194.100	26.252.290			
	38	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Mukhlis, S. Pd	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	755.446.390	1,18	99,16	1,17	96,52	729.194.100	26.252.290			
UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG					197.323.000		90,66		90,63	184.573.900	12.749.100			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					69.206.000					61.014.500	8.191.500			
19		Administrasi Umum Perangkat Daerah			52.206.000					46.246.000	5.960.000			
	39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Verawaty, SE	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	52.206.000	0,08	88,59	0,07	88,58	46.246.000	5.960.000			
20		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.000.000					14.768.500	2.231.500			

	40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Verawaty, SE	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	17.000.000	0,03	86,87	0,02	86,87	14.768.500	2.231.500			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					128.117.000					123.559.400	4.557.600			
21	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil				128.117.000					123.559.400	4.557.600			
	41	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Verawaty, SE	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	128.117.000	0,20	96,53	0,19	96,44	123.559.400	4.557.600			
UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA					205.611.000		82,82		80,05	178.608.620	27.002.380			
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>					<i>205.611.000</i>					<i>114.038.800</i>	<i>26.069.200</i>			
22	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.582.000					18.554.800	26.027.200			
	42	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Yuni Fachrizal Noor, SE	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	44.582.000	0,07	49,93	0,03	41,62	18.554.800	26.027.200			
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95.526.000					95.484.000	42.000			

	4 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Yuni Fachrizal Noor, SE	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	95.526.000	0,15	99,96	0,15	99,96	95.484.000	42.000			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										64.569.820	933.180			
24		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			65.503.000					64.569.820	933.180			
	4 4	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Yuni Fachrizal Noor, SE	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	65.503.000	0,10	98,58	0,10	98,58	64.569.820	933.180			
UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK					45.353.900					35.948.500	9.405.400			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.353.900					35.948.500	9.405.400			
25		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.353.900					35.948.500	9.405.400			
	4 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adji Dewi Mekar Rezeki, S.Pd	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	45.353.900	0,07	81,56	0,06	79,26	35.948.500	9.405.400			
UPT TEMPAT PENDARATAN IKAN KENYAMUKAN					203.261.000					166.068.267	37.192.733			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					203.261.000					166.068.267	37.192.733			

26	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				203.261.000					166.068.267	37.192.733			
	46	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rosita Kuna, S.Pi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	203.261.000	0,32	88,69	0,28	81,70	166.068.267	37.192.733			
UPT TEMPAT PENDARATAN IKAN SANGKULIRANG					151.425.700					120.877.740	30.547.960			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					151.425.700					120.877.740	30.547.960			
27	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				151.425.700					120.877.740	30.547.960			
	47	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Hayatun Nufus, S.Pi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	151.425.700	0,24	79,83	0,19	79,83	120.877.740	30.547.960			
		JUMLAH			64.027.788.081	100	85,05	92,09	82,10	52.569.092.876	11.458.695.205			

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4(empat) bidang serta kelompok Jabatan fungsional dan UPTD. Pada Tahun 2016, terbit Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) bidang serta kelompok jabatan fungsional dan UPTD. Peraturan Bupati yang menjadi dasar pembentukan organisasi lainnya diantaranya adalah Peraturan Bupati Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Bupati Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kaliorang di Kecamatan Kaliorang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Laut Sangkima di Kecamatan Sangatta Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Peraturan Bupati Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang Teluk Lombok di Kecamatan Sangatta Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Bupati Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Dinas Perikanan

1. KEPALA DINAS PERIKANAN

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Penetapan kebijakan teknis bidang Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perikanan;
3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap;
4. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya;
5. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Pemasaran;
6. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya;
7. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

2. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan

teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan yang meliputi Perencanaan Program, Umum dan Keuangan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
2. Mempelajari, menindaklanjuti informasi, data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan;
4. Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
5. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
6. Pengusulan program Perikanan dan pelatihan aparatur/kepegawaian.

3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN USAHA KECIL BUDIDAYA IKAN

a. Tugas Pokok

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan melaksanakan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan dan teknologi; bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan bidang sarana dan prasarana budidaya.
- (2) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perikanan.

b. Fungsi

1. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan;

2. perumusan kebijakan dalam bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan;
3. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan;
4. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan;
5. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
6. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang sarana dan prasarana budidaya.

4. KEPALA BIDANG PELAPORAN DAN USAHA PERIKANAN

a. Tugas Pokok

- (1) Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang teknologi penangkapan dan Sumber Daya Ikan, bidang sarana dan prasarana tangkap dan bidang pengelolaan Sumber Daya Ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan.
- (2) Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perikanan.

b. Fungsi

1. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan;
2. perumusan kebijakan dalam bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan;
3. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan;

4. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang teknologi penangkapan dan sumber daya ikan;
5. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang sarana dan prasarana tangkap; dan
6. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan SDI dan pelayanan usaha penangkapan ikan.

5. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN

a. Tugas Pokok

- (1) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan teknis dan bimbingan, serta pengendalian teknis di bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan.
- (2) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perikanan.

b. Fungsi

1. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan;
2. pelaksanaan program kegiatan pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan;
3. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan;
4. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan;
5. perumusan kebijakan dalam bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan;
6. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan; dan

7. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan pengawasan perikanan;

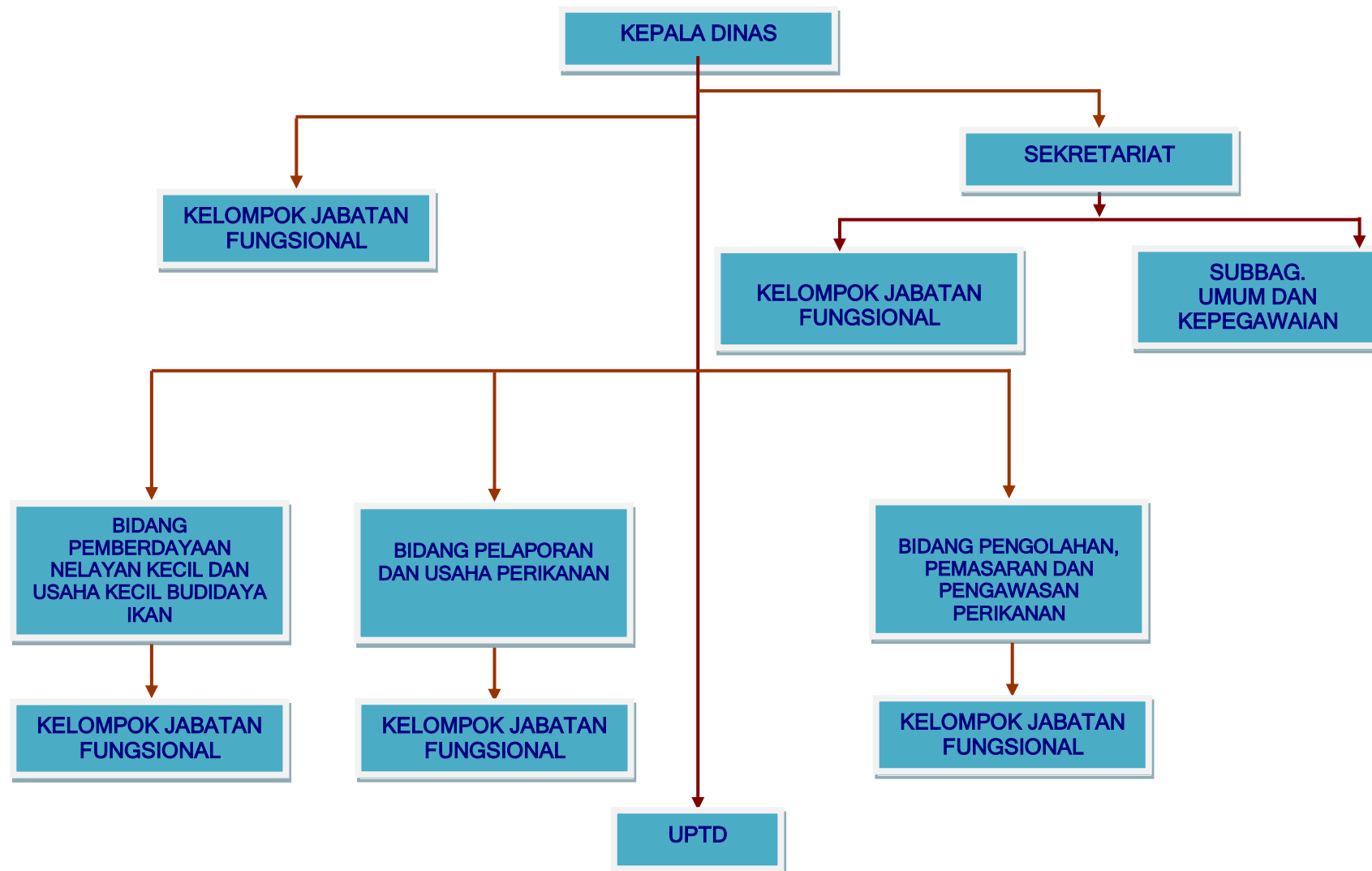
➤ **Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang serta UPTD. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemberian Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan
- d. Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan
- e. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan, terdiri dari:
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 1. UPT. TPI Kenyamukan
 2. UPT. TPI Sangkulirang
 3. UPT. BBI Kaliorang
 4. UPT. BBIL
 5. UPT. BBU
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi seperti pada gambar 2.1 berikut :

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2023

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur diuraikan berdasarkan pada table 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

REVIEW RANCANGAN AWAL RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting
		Output		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN Nilai SAKIP		70.50 80	13.814.154.301		
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	47.519.000	PAD	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	52.481.000	PAD	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.639.154.301		
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang/bulan	12.539.154.301	PAD	
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100.000.000	PAD	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	PAD	

3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				350.000.000		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	150.000.000	PAD	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000	PAD	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000	PAD	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150.000.000	PAD	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				336.000.000		
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	336.000.000	PAD	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000		
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000	PAD	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Timur Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	17.708.375	PAD	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				139.000.000		
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	139.000.000	PAD	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		8799,28	1.850.000.000		
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		

3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	PAD	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000.000		
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	1.750.000.000	PAD	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		1138,63	3.800.000.000		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1.500.000.000		
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	1.500.000.000	PAD	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidaya Ikan				2.300.000.000		
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	100.000.000	PAD	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.700.000.000	PAD	
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	200.000.000	PAD	
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	300.000.000	PAD	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang diawasi		48,65	50.000.000		
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya				50.000.000		

	yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	50.000.000	PAD	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Perikanan		43,49	811.712.000		
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				61.712.000		
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	61.712.000	PAD	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				750.000.000		
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	750.000.000	PAD	
	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang				100.000.000		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN Nilai SAKIP		70,50	20.000.000		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.000.000		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000	PAD	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan budidaya		1138,63	62.291.625		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				62.291.625		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	62.291.625	PAD	
	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba				25.000.000		

3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		1138,63	25.000.000		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				25.000.000		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	25.000.000	PAD	
	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan				50.000.000		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		8799,28	50.000.000		
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				50.000.000		
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan	50.000.000	PAD	
	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang	Produksi Perikanan Tangkap		8799,28	50.000.000		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				50.000.000		
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Terlayani		1 Unit	50.000.000		
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan	50.000.000	PAD	
		Total			20.550.866.301		

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP. Yang perlu diperhatikan adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro poor* (Pengentasan kemiskinan), *pro job* (Penyerapan Tenaga kerja), *pro growth* (Pertumbuhan), *pro environment* (Pemulihan dan pelestarian lingkungan)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun visi yaitu, "*Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing*". Dan misinya yaitu :

1. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berpartisipasi.
2. Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas.
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan.

Mendukung visi dan misi Bupati terpilih, maka disusunlah Renja 2026. Adapun Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan efektifitas fungsi kelembagaan
2. Mewujudkan sistem perikanan dengan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan
3. Menumbuhkembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi perikanan
4. Menggerakkan perekonomian di wilayah produksi perikanan pedesaan/pesisir untuk memperluas akses pasar Domestik dan Internasional
5. Mewujudkan sistem perikanan unggul berkelanjutan berbasis iptek guna mendorong pertumbuhan produksi komoditas unggulan dan suplay bahan baku agroindustri
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya/nelayan berdasarkan visi dan misi Kabupaten

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia yang memiliki peran sekaligus dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan ekonomi tahun 2026 mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 yakni *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur mengacu pada RPJMD 2025 yaitu *“ Peningkatan infrastruktur Dasar untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Daerah”*.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan.
2. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana.
4. Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan.
5. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif.
6. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan.

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rumusan rencana program dan kegiatan berdasarkan Renstra 2025- 2029 Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2026 dan Tahun 2027 dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:

TABEL 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Output		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN Nilai SAKIP		70,50 80	13.814.154.301.			-	27.775.420.000
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	100.000.000			-	830.000.000
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	47.519.000	PAD		-	650.000.000
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	52.481.000	PAD		-	180.000.000
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan		-	12.639.154.301			-	23.317.420.000
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang/bulan	12.539.154.301	PAD		-	23.167.420.000

3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100.000.000	PAD		-	150.000.000
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	50.000.000			-	35.000.000
3.25.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	PAD		-	35.000.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	350.000.000			-	1.995.000.000
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	150.000.000	PAD		-	1.150.000.000
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000	PAD		-	185.000.000
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000	PAD		-	60.000.000
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150.000.000	PAD		-	600.000.000
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	336.000.000				500.000.000

3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	336.000.000	PAD		-	500.000.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	200.000.000				785.000.000
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000	PAD		-	785.000.000
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	17.708.375	PAD		-	26.000.000
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	139.000.000				313.000.000
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	139.000.000	PAD		-	313.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		8799,28	1.850.000.000				6.300.000.000
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota			-	100.000.000				300.000.000
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	100.000.000	PAD		-	300.000.000

		Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kel/Desa						
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	1.750.000.000			-	6.000.000.000
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	1.750.000.000	PAD		-	6.000.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		1138,63	3.800.000.000				3.950.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			-	1.500.000.000				450.000.000
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	1.500.000.000	PAD		-	450.000.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			-	2.300.000.000				3.500.000.000
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	100.000.000	PAD		-	200.000.000
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.700.000.000	PAD		-	2.000.000.000
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring Kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 9satu)	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua	12 Dokumen	200.000.000	PAD		-	300.000.000

		daerah kabupaten/kota	Kel/Desa						
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	300.000.000	PAD		-	1.000.000.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang diawasi		-	50.000.000				150.000.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			-	50.000.000				150.000.000
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	50.000.000			-	150.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Perikanan		-	811.712.000				1.100.000.000
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			-	61.712.000				400.000.000
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	61.712.000	PAD		-	400.000.000

3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			-	750.000.000				700.000.000
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	750.000.000	PAD		-	700.000.000
	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang				100.000.000				362.000.000
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN Nilai SAKIP		70,50 80	20.000.000				66.000.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	20.000.000				66.000.000
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000	PAD		-	66.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		1138,63	62.291.625			-	270.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			-	62.291.625				270.000.000
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	62.291.625	PAD		-	270.000.000

	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba				25.000.000				100.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		1138,63	25.000.000				100.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			-	25.000.000				100.000.000
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	25.000.000	PAD		-	100.000.000
	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan				50.000.000				300.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		8799,28	50.000.000				300.000.000
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			-	50.000.000				300.000.000
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan	50.000.000	PAD		-	300.000.000
	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang				50.000.000				350.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		8799,28	50.000.000				350.000.000
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Terlayani		-	50.000.000				350.000.000
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kutai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan	50.000.000	PAD		-	350.000.000

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2026, terdapat 5 program, 20 kegiatan, 28 sub kegiatan dan jumlah indikasi anggaran sebesar Rp. 20.550.866.301 .,

BAB 5

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Perikanan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dimana Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu serta sumber pendaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kepala Dinas Perikanan selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.

Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala Dinas Perikanan berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dengan persetujuan Bupati.

5.3 Saran dan Tindak Lanjut

Rencana kegiatan pembangunan tahunan SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar target capaian rencana kerja dapat

direalisasikan dengan baik maka perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, ketersediaan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kutai Timur ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja berikutnya.